

**GERAKAN SOSIAL MASYARAKAT KAMPUNG LABALUBA DESA KONTUMERE  
KECAMATAN KABAWO KABUPATEN MUNA TAHUN 1960-1980<sup>1</sup>**

***SOCIAL COMMUNITY MOVEMENT KAMPUNG LABALUBA VILLAGE CONTUMERE  
KECAMATAN KABAWO MUNA DISTRICT, 1960-1980<sup>1</sup>***

**Nurwan<sup>2</sup>**

e-mail: [nurwanpsi33@gmail.com](mailto:nurwanpsi33@gmail.com)

**Ali Hadara<sup>3</sup>**

e-mail: [alihadara@uho.ac.id](mailto:alihadara@uho.ac.id)

**La Batia<sup>3</sup>**

e-mail: [labatia@uho.ac.id](mailto:labatia@uho.ac.id)

<sup>1</sup>)Hasil Penelitian Tahun 2019, <sup>2</sup>)Alumni Jurusan Pendidikan Sejarah, <sup>3</sup>) Dosen FKIP UHO

**ABSTRAK:** Inti pokok masalah dalam penelitian ini meliputi latar belakang gerakan sosial masyarakat Kampung Labaluba Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna, Faktor-faktor yang mendorong gerakan sosial masyarakat Kampung Labaluba Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna, proses gerakan sosial masyarakat Kampung Labaluba Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna dan akibat gerakan sosial masyarakat Labaluba Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna? Latar belakang gerakan sosial masyarakat Kampung Labaluba yaitu keadaan kampungnya yang hanya terdiri dari beberapa kepala keluarga tiap kampung dan jarak yang jauh masing-masing kampung membuat keadaan masyarakatnya sulit untuk berkomunikasi dan tiap kampung hanya terdiri dari lima sampai dengan tujuh kepala keluarga saja. Kampung ini letaknya paling timur pulau Muna terbentang dari ujung kota Raha sekarang sampai kampung Wakuru yang saat ini. Kondisi ini juga yang menjadi salah satu faktor penyebab kampung ini kurang berkembang baik dibidang ekonomi, sosial politik, pendidikan maupun di bidang kebudayaan. Keadaan ini diperparah lagi dengan sifat dan karakter penduduknya yang masih sangat primitif. Faktor yang mendorong adanya gerakan sosial masyarakat Kampung Labaluba Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna adalah adanya ketidaksesuaian antara keinginan pemerintah setempat dan masyarakat yang mendiami Kampung Labaluba pada waktu itu. Sedangkan proses gerakan sosial masyarakat Kampung Labaluba Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna bermula ketika pemerintah seolah memaksakan kehendaknya kepada rakyat yang menyebabkan rakyat tidak setuju dengan kebijakan tersebut. Akibat yang ditimbulkan dari adanya gerakan sosial masyarakat Kampung Labaluba Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna terbagi dua yaitu akibat positif dan akibat negatif.

**Kata Kunci:** *Gerakan Sosial, Factor dan Dampaknya*

**ABSTRACT:** *The main issues in this study include the background of the social movement of Labaluba Village, Kontumere Village, Kabawo Sub-District, Muna District, Factors that encourage social movements of Labaluba Kampung Sub-village, Kontumere Village, Kabawo Sub-District, Muna District, the social movement process of Labaluba Village, Kontumere Village, Kabawo Sub-District Muna Regency and due to Labaluba community social movements Kontumere Village Kabawo District Muna Regency? The background of the Labaluba Kampung community social movement is that the condition of the village consists of only a few heads of households per village and the distance of each village makes it difficult for the community to communicate and each village only consists of five to seven households. This village is located east of the island of Muna stretching from the edge of the city of Raha now to the current village of Wakuru. This condition is also one of the factors causing the village to be less developed in the economic, social political, educational and cultural fields. This situation is made worse by the very primitive nature and character of the population. The factor that motivated the existence of the social movement of Labaluba Village in Kontumere Village, Kabawo Subdistrict, Muna Regency was the mismatch between the wishes of the local government and the people who inhabited Labaluba Village at that time. While the process of social movements in Labaluba Village, Kontumere Village, Kabawo District, Muna Regency began when the government seemed to impose its will on the people, causing the people to disagree with the policy. The consequences arising from the existence of social movements in Labaluba Village, Kontumere Village, Kabawo District, Muna Regency are divided into two, namely positive and negative effects.*

**Keywords:** *Social Movements, Factors and their Impacts*

## PENDAHULUAN

Permasalahan kependudukan di Indonesia sangat beraneka ragam. Beberapa permasalahan kependudukan itu antara lain jumlah kelahiran yang masih cukup besar setiap tahunnya, persebaran penduduk yang kurang merata, struktur umur penduduk masih tergolong kepada struktur muda sehingga angka ketergantungan masih cukup tinggi. Menanggapi berbagai permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai program dan rencana pembangunan dalam upaya untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk, mengurangi ketidakseimbangan penyebaran penduduk dan mengatasi masalah kemiskinan. Beberapa upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut antara lain untuk mengendalikan jumlah dan pertumbuhan penduduk maka pemerintah melakukan upaya dengan cara menekan angka kelahiran, menunda usia perkawinan muda dan meningkatkan pendidikan. Sedangkan untuk pemerataan penyebaran penduduk dan mengatasi kemiskinan, pemerintah melakukan upaya dengan cara transmigrasi dan pembangunan industri di wilayah yang jarang penduduknya.

Bintarto (2007: 1) dalam bukunya sejarah pemerintahan desa dan kelurahan, menulis bahwa desa adalah hasil perwujudan antara kegiatan kelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perwujudan itu adalah suatu wujud atau penampakan dimuka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial ekonomi, politis, dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah lain.

Salah satu wilayah Sulawesi Tenggara yang menjadi daerah tempat dan tujuan migrasi adalah Desa Kontumere. Keadaan geografisnya yang memiliki letak yang strategis yaitu berada pada jalur poros Tampo-Wamengkoli membuat pemerintah setempat memandang bahwa perlu adanya pemindahan penduduk masyarakat Labaluba Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna ke Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna. Keadaan geografisnya yang memiliki tanah yang subur membuat sebagian besar masyarakat migran Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna bermata pencaharian di bidang pertanian, peternakan dan perdagangan. Pada awal kedatangannya, masyarakat migran mulai bermukim di lokasi dan sebagian lagi di perumahan yang telah disediakan oleh pemerintah. Tempat yang mereka tinggali masih sangat sederhana, akses jalan yang belum memadai, belum ada aliran listrik, sumber air bersih masih kurang dan kebutuhan rumah tangga lainnya yang masih serba terbatas. Dalam perkembangan selanjutnya, mereka perlahan mulai menyesuaikan dengan kondisi baru. Setelah mereka dapat menyesuaikan diri, mereka semakin mudah mengolah lahan yang dijadikan sebagai lahan pertanian dan yang lainnya. Selain membuka lahan, mereka juga mulai berternak dan berdagang. Seiring dengan perkembangan, dari tahun ke tahun kehidupan masyarakat migran mengalami perkembangan. Kehidupan masyarakat yang pada awalnya masih sangat sederhana dengan segala keterbatasan di bidang sosial, ekonomi, budaya dan bidang lainnya, kini telah mengalami perkembangan yang cukup berarti. Dengan perkembangan tersebut, membuat kehidupan masyarakat migran menjadi lebih baik dibandingkan dengan keadaan mereka pada awal kedatangannya di Desa Kontumere.

Dalam proses perpindahan penduduk Labaluba Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna ke Desa Kontumere, baik masyarakat maupun pemerintah setempat bukannya tanpa hambatan. Berbagai hambatan dan kendala timbul, baik di pihak pemerintah maupun di pihak masyarakat sendiri. Kendati mengalami berbagai hambatan dan problem dalam pemindahan tersebut, namun dalam perjalanannya program pemerintah tersebut dalam memindahkan masyarakat Labaluba Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna ke Desa Kontumere tetap dapat dikatakan mengalami keberhasilan sebab dalam perkembangan selanjutnya, masyarakat mulai terbiasa dan bahkan menikmati suasana kampung baru yang mereka tinggali. Problem utama bagi masyarakat adalah lahan yang disediakan bagi pemerintah untuk ditempati sebagian besar masih dalam bentuk hutan yang mana segala sumber fasilitas kehidupan seperti air bersih, bahan makanan dan lain sebagainya masih sulit dijangkau, bahkan masyarakat yang akan melakukan migrasi tersebut sempat kesulitan dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Dilain sisi juga masyarakat yang akan melakukan migrasi ini sudah terbiasa dengan kampung lama yang mereka tinggali, dan disinilah mereka menggantungkan hidupnya sehari-harinya. Keengganan masyarakat untuk meninggalkan kampung mereka adalah segala fasilitas hidup dan alat pemenuhan kehidupan mereka dapat terpenuhi di sini meskipun masih dalam bentuk yang masih sangat sederhana. Sehingga muncul gerakan gerakan

penolakan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Horton dan Hunt, (1984: 195) bahwa gerakan sosial merupakan salah satu bentuk utama dari perilaku kolektif. Secara formal gerakan sosial didefinisikan sebagai suatu kolektifitas yang melakukan kegiatan dengan kadar kesinambungan tertentu untuk menolak perubahan yang terjadi dalam masyarakat atau kelompok yang mencakup kolektifitasnya sendiri.

Gerakan sosial adalah suatu upaya kolektif untuk mengejar suatu kepentingan bersama atau gerakan mencapai tujuan bersama melalui tindakan kolektif (*collective action*) di luar lingkup lembaga-lembaga yang mapan. Jadi dapat kita tafsirkan mengenai definisi gerakan sosial adalah sebuah gerakan yang dilakukan secara bersama-sama demi mencapai tujuan yang sama-sama diinginkan oleh kelompok atau dengan kata lain gerakan sosial adalah tindakan kolektif untuk mencapai keinginan yang menjadi tujuan bersama (Putra, 2006: 3).

Untuk mengatasi hal tersebut maka pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, hal ini sejalan dengan pemikiran Agustino (2008:7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Di pihak pemerintah sendiri, kendala yang dihadapi dalam rencana pemindahan penduduk masyarakat Labaluba Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna ke Kampung Baru atau yang sekarang disebut Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna adalah dalam proses pemindahan penduduk ini, pemerintah memerlukan tenaga yang ekstra keras sebab masyarakat Labaluba Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna sendiri penduduknya yang masih terpencar-pencar dalam artian bahwa pemukiman masyarakat masih belum tertata rapi ruang lingkup kehidupannya. Jarak antara rumah yang satu dengan rumah yang lainnya sangat jauh ditambah lagi jalan-jalan di daerah ini yang masih dalam bentuk jalan setapak-setapak merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam upaya memindahkan penduduk masyarakat Labaluba Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna ke Desa Kontumere. Pemerintah setempat memerlukan koordinasi yang cukup ekstra dalam upaya pemindahan ini. Di sisi lain, adanya penolakan dari masyarakat setempat membuat pihak pemerintah dalam upaya melakukan pemindahan penduduk masyarakat Labaluba Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna perlu adanya pendekatan lebih terhadap masyarakat setempat untuk meyakinkan mereka. Negosiasi demi negosiasi dilakukan pemerintah untuk meyakinkan penduduk setempat bahwa program pemindahan penduduk ini demi mamajukan dan mensejahterakan masyarakat itu sendiri. Konflik sosial yang timbul antara pihak pemerintah dan masyarakat setempat semakin menambah sulitnya pemerintah dalam upaya pemerataan dan peningkatan taraf hidup penduduk ke arah yang lebih baik dan lebih maju. Dengan adanya keseriusan pemerintah dalam memajukan kehidupan masyarakat dalam segala segi, maka semua konflik sosial dan segala bentuk penolakan masyarakat setempat lantas tidak membuat pemerintah kehabisan cara dalam upaya pemindahan penduduk tersebut. Walhasil, dalam perkembangannya masyarakat berhasil di pindahkan dan dalam perjalanan kehidupannya, masyarakat mulai terbiasa dengan kondisi dan keadaan kampung baru yang mereka tinggali. Bahkan seiring berjalannya waktu, masyarakat sangat menikmati suasana baru tersebut. Bagi pemerintah, keberhasilan program tersebut adalah pencapaian terbesar dalam upaya meningkatkan taraf kehidupan rakyat kearah yang lebih maju.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna. Dengan jenis penelitian ini merupakan penelitian sejarah yang bersifat deskriptif kualitatif yakni penulis memberikan gambaran yang jelas tentang gerakan sosial masyarakat Kampung Labaluba Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna, sebab-sebab gerakan sosial rakyat Labaluba Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna menentang pemindahan penduduk, proses gerakan sosial

masyarakat Kampung Labaluba Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna dan akibat gerakan sosial rakyat Labaluba Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna menentang pemindahan penduduk.

Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan strukturis yang terdapat tiga domain dalam penelitian sejarah yaitu domain peristiwa, domain struktur, dan domain strukturis. Dalam pendekatan strukturis ini mempelajari peristiwa dan struktur sebagai suatu kesatuan yang melengkapi, artinya mengandung kekuatan mengubah struktur sedangkan struktur mengandung hambatan atau dorongan bagi perubahan dalam masyarakat. Pendekatan struktur ini memandang pelaku sejarah tidak dapat dipisahkan dari struktur. Terdapat tiga domain dalam penelitian sejarah yaitu domain peristiwa, domain struktur dan domain strukturis (Leirissa, 1996: 12-13).

#### 1. Domain Peristiwa

Penelitian dan penulisan sejarah menggunakan domain peristiwa merupakan pendekatan penulisan sejarah tertua, dan penelitian ini lebih menkankan pada penulisan sejarah berdasarkan peristiwa atau kejadian. Domain penelitian ini mengedepankan interpretasi peristiwa melalui pemahaman jalan pikiran dari pelaku sejarah sebagai cara utama. Domain peristiwa juga memiliki kelebihan yang menjadi ciri utama domain peristiwa yaitu mempelajari secara mendalam suatu peristiwa (event) atau kejadian, menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, dimana, dan bagaimana, mempelajari sesuatu yang dapat ditangkap panca indra, menganut filsafat idealis-subyektif atau filsafat sejarah spekulatif, mempelajari sesuatu yang unik atau khas (ideografis), kasuistik, dan tunggal.

#### 2. Domain Struktural

Domain struktural bertujuan untuk menghasilkan analisis struktur social, mempelajari sejarah secara struktur atau sistemik, menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana ( menjelaskan kausalitas hubungan sebab-akibat), mempelajari sesuatu yang tidak dapat ditangkap oleh panca indra (tersembunyi), menganut filsafat sejarah realis-objektif atau filsafat sejarah kritis, mempelajari sesuatu yang umum atau universal, memiliki rantang waktu yang panjang, bertujuan memprediksi masa yang akan datang (Historisisme), serta menggunakan model penulisan analisis-sintesis.

#### 3. Domain Strukturis

Dalam pendekatan ini, domain strukturis memandang bahwa pada dasarnya struktur sejarah masih tetap penting, akan tetapi yang lebih penting adalah perubahan structural karena domain strukturis memiliki tujuan untuk menemukan Causal Mechanism (mekanisme hubungan sebab akibat) dari perubahan social sebagai kenyataan obyektif yang diilhami oleh ilmu-ilmu alam tetapi berbeda dengan ilmu-ilmu alam, causal mechanism adalah ilmu sejarah yang menyangkut manusia dengan mental structure-nya, dan arena itu sudah tentu causal mechanism dalam perubahan social tidak sama bahkan sangat berbeda dengan causal mechanism yang terdapat dalam ilmu alam dan tidak bisa ditampilkan dalam rumusan matematika. Metode strukturis juga dapat menjelaskan dengan lebih memuaskan proses perubahan dari tradisional ke tatanan modern yang merupakan tema pokok kajian sejarah structural dan metode ini juga dapat memperkaya domain structural dalam ilmu sejarah.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) Sumber tertulis, yakni data-data yang diperoleh berupa data-data yang dikumpulkan dari kantor Kecamatan Kabawo, hasil penelitian, skripsi, bahan-bahan serta sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. (2) Sumber lisan, yakni data yang diperoleh melalui keterangan lisan atau wawancara dengan informan atau orang yang dianggap banyak mengetahui proses pemindahan penduduk rakyat Labaluba Kecamatan Kabawo, (3) Sumber visual (benda-benda, peralatan dan kegiatan) yaitu data yang diperoleh melalui hasil pengamatan langsung terhadap alat-alat dan proses pemindahan penduduk rakyat Labaluba Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna.

Prosedur yang digunakan dalam penelitian ini adalah prosedur sejarah yang dikemukakan oleh Sjamsuddin (2007: 17-239) yaitu: (1) Heuristik (pengumpulan sumber) dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan, pengamatan, wawancara dan studi dokumen, (2) Kritik sumber, yang dilakukan dengan kritik internal dan kritik eksternal (3) Historiografi yang dilakukan dengan cara interpretasi, eksplanasi, dan ekspose

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Latar Belakang Gerakan Sosial Masyarakat Kampung Labaluba Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna Tahun 1960-1980**

Labaluba atau yang sering disebut dengan istilah kampung lama sekarang ini mempunyai berbagai rentetan peristiwa sejarah yang cukup panjang. Kampung ini letaknya berada di pedalaman yang jauh dari keramaian, jarang tersentuh kebijakan pemerintah dan kurangnya komunikasi antar kampung. Sebelum terjadinya pemindahan penduduk yang merupakan program dari pemerintah kabupaten, keadaan masyarakat ini sangat terisolir dimana para penduduknya hanya melakukan kontak sosial terbatas hanya antar penduduk kampung setempat, dan jarang melakukan kontak di luar kampung yang mereka tinggali. Keadaan kampungnya yang hanya terdiri dari beberapa kepala keluarga tiap kampung dan jarak yang jauh masing-masing kampung membuat keadaan masyarakatnya sulit untuk berkomunikasi dan tiap kampung hanya terdiri dari lima sampai dengan tujuh kepala keluarga saja. Kampung ini letaknya paling timur pulau Muna terbentang dari ujung kota Raha sekarang sampai kampung Wakuru yang saat ini. Kondisi ini juga yang menjadi salah satu faktor penyebab kampung ini kurang berkembang baik dibidang ekonomi, sosial politik, pendidikan maupun di bidang kebudayaan. Keadaan ini diperparah lagi dengan sifat dan karakter penduduknya yang masih sangat primitif. Terbukti dengan cara pemenuhan kebutuhan mereka yang masih mengandalkan dari hasil ladang yang hanya terdiri dari jagung, ubi da sedikit kacang tanah. Hasil ladang inipun hanya bisa di panen dalam jangka waktu rata-rata tiap enam bulan sekali. Hasil ladangpun kadang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam jangka selama musim panen berikutnya karena keadaan alam yang tidak menentu dan kondisi lahannya yang kurang subur lagi kurangnya pemahaman penduduknya tentang sistem tanam. Tidak jarang penduduk kampung ini mengalami wabah penyakit bahkan ada yang sampai meninggal dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakatnya tentang kesehatan dan keadaan masyarakatnya yang jarang diperhatikan oleh pemerintah setempat. Kendati demikian, di tengah situasi seperti ini adakalanya masyarakat merasakan kehidupan yang nyaman dan terpenuhi segala kebutuhannya bahkan kadang persediaan pangan terpenuhi dalam jangka masa panen berikutnya. Situasi seperti ini terjadi ketika keadaan cuaca mendukung masa bertanam mereka. Perlu diketahui bahwa keadaan lahan ladang yang menjadi tempat bercocok tanam masyarakat kampung Labaluba adalah sebenarnya merupakan sebagian besar sangat subur walaupun juga banyak lahan yang berbatu-batu. Keadaan seperti dikarenakan sebagian besar lahannya terdiri dari banyak bukit yang tersebar tidak merata di sepanjang kampung Labaluba ini. Namun, kurangnya kesadaran masyarakat tentang sistem bercocok tanam dan kurangnya perhatian pemerintah setempat membuat lahan yang sebenarnya terdiri dari lahan yang subur ini menjadi sebuah lahan yang kadang memberikan hasil ladang yang melimpah bagi masyarakat dan kadang memberikan hasil yang kurang memenuhi kebutuhan bagi masyarakatnya. Sebagaimana diketahui bahwa masyarakat Kampung Labaluba ini masih menggunakan cara tradisional dalam bercocok tanam. Situasi seperti ini diperparah lagi dengan pola pemikiran masyarakat yang hanya berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya dalam jangka waktu satu musim berikutnya sedangkan untuk memenuhi kebutuhan dalam jangka panjang mereka tidak mempersiapkannya. Bahkan jika keadaan cuaca yang kurang mendukung tidak sedikit masyarakat yang terserang penyakit bahkan kadang ada banyak yang meninggal

Menjelang awal tahun 60-an pemerintah mulai mewacanakan suatu kebijakan yang dapat membawa keadaan masyarakat kampung labaluba kearah yang lebih baik dan lebih maju. Suatu proses transmigrasi direncanakan oleh pemerintah guna untuk membangun keadaan bidang ekonomi, sosial politik, pendidikan maupun bidang kebudayaan kearah yang lebih maju. Pemerintah Kabupaten segera mengintruksikan kepada pemerintah kecamatan dan pemerintah desa untuk mengadakan sosialisasi mengenai rencana transmigrasi atau pemindahan masyarakat tersebut ke desa-desa yang dapat memberikan kehidupan yang lebih baik kepada mereka. Tujuan sebenarnya pemerintah dari rencana program transmigrasi tersebut adalah agar masyarakat kampung labaluba kabupaten Muna dapat mencapai tingkat kemajuan dalam bidang ekonomi, sosial politik, pendidikan maupun bidang kebudayaan kearah yang lebih baik dan supaya masyarakat merasakan setiap program kebijakan lainnya yang diambil pemerintah dalam memajukan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan kebijakan tersebut

diharapkan setiap setiap penduduk masyarakat kampung labaluba setidaknya dapat merasakan dampak positif dari setiap program yang dijalankan oleh pemerintah.

Dibawah pengawasan dan koordinator camat Kabawo bapak La Ditu, pada tahun 1960 pemerintah masing-masing desa yang mulai mensosialisasikan dan memperkenalkan program transmigrasi atau pemindahan penduduk ke daerah-daerah yang telah ditunjuk oleh pemerintah Kecamatan yang pada waktu itu pemerintah Kecamatan Kabawo dipimpin oleh bapak La Ditu. Pemerintah Desa yang diawasi oleh pemerintah Kecamatan mengatakan bahwa tujuan dari adanya transmigrasi atau pemindahan penduduk tersebut adalah guna mensejahterakan kehidupan penduduk kampung Labaluba dan meratakan pembangunan kehidupan masyarakatnya disegala bidang baik bidang ekonomi, sosial politik, pendidikan maupun bidang kebudayaan dalam rangka mendorong pembangunan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kearah yang lebih baik.

Menanggapi rencana pemerintah tersebut untuk memindahkan masyarakat kampung Labaluba ke Desa-desa yang telah ditunjuk tadi, masyarakat merespon hal tersebut dengan berbagai tanggapan dan komentar. Banyak masyarakat kampung Labaluba yang berkomentar bahwa rencana pemerintah untuk memindahkan masyarakat kampung Labaluba hanya akan menimbulkan berbagai problem dan permasalahan. Sebagian masyarakat kampung Labaluba beranggapan bahwa program tersebut tidak akan membawa perubahan bagi kehidupan mereka, mereka lebih memilih tinggal di tempat semula daripada pindah ke tempat yang jauh lagi belum teruji kelayakan untuk sebuah perkampungan baru. Anggapan masyarakat kampung Labaluba ini bukannya tanpa alasan, masyarakat kampung Labaluba menyadari betul bahwa tempat yang dituju adalah sebuah tempat yang masih dalam bentuk hutan belantara yang sebagian besar hutan tersebut terdiri dari hamparan alang-alang. Masyarakat kampung Labaluba menyadari betul bahwa lahan yang dituju tersebut sebuah areal lahan yang kurang subur sehingga menurunkan minat mereka untuk melakukan proses transmigrasi yang diwacanakan oleh pemerintah tersebut. Tentu keadaan ini adalah sebuah situasi pro kontra yang membuat pemerintah Kecamatan dan pemerintah Desa berpikir ekstra keras untuk melancarkan dan mensukseskan program tersebut.

Banyak masyarakat yang kontra terhadap rencana pemerintah tersebut namun tidak sedikit juga yang pro dengan adanya rencana kebijakan tersebut. Mereka yang setuju dengan kebijakan tersebut beranggapan bahwa dengan adanya kebijakan tersebut membuat keadaan dapat dikontrol dan dipenuhi segala kebutuhannya oleh pemerintah bila sewaktu-waktu masyarakat memerlukan bantuan. Mereka yang setuju dengan rencana pemindahan penduduk ini sadar bahwa suatu masyarakat yang masih terbelakang untuk menuju kearah pembangunan yang terarah harus memerlukan proses pembangunan yang terarah pula yang mana pembangunan itu salah satunya dengan program transmigrasi atau pemindahan penduduk masyarakat kampung Labaluba yang masih terpencar-pencar untuk dihimpun dalam satu desa atau kampung dalam jumlah populasi yang lebih besar dan area lahan yang tidak terlalu luas. Bagi masyarakat yang bertempat tujuan di Desa Kontumere, ini adalah sebuah keuntungan mengingat tempat tersebut berada di tengah Ibu Kota Kecamatan, yaitu Kecamatan Kabawo yang berarti bahwa proses pembangunan lebih diutamakan. Kondisi seperti ini oleh sebagian masyarakat dianggap sebagai langkah jitu dalam proses pemerataan pembangunan disegala bidang (La Maje, wawancara: 20 Januari 2019).

### **Faktor-faktor Yang Mendorong Gerakan Sosial Masyarakat Kampung Labaluba Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna Tahun 1960-1980**

Kecamatan Kabawo adalah salah satu daerah kecamatan yang ada di propinsi Sulawesi Tenggara kabupaten Muna. Salah satu hal yang menarik dari daerah ini adalah lokasinya yang sangat strategis berada di jalur transportasi atau jalan poros Raha-Wamengkoli yang membuat daerah ini merupakan salah satu daerah dengan tingkat perkembangan pembangunan arat-rata mengalami peningkatan tiap tahunnya. Kehidupan masyarakat kampung Labaluba yang pada waktu itu masih sangat sederhana dan terbelakang membuat pemerintah kecamatan berpikir untuk mengadakan suatu kebijakan yang dapat membuat masyarakat Kampung Labaluba merasakan setiap kebijakan secara menyeluruh. Maka oleh pemerintah Kabupaten mengintruksikan kepada pemerintah Kecamatan dan Desa untuk mensosialisasikan rencana pemindahan tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak La Nusu pada tanggal 21 Januari 2019, pada tahun 1965 pemerintah Kecamatan Kabawo yang pada saat itu dipimpin oleh Bapak La Ditu mulai

mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai rencana pemerintah tersebut. Maka masyarakat Kampung Labaluba pada waktu itu mulai memikirkan hal tersebut. Suatu keadaan sulit dialami oleh pemerintah Kecamatan pada waktu itu ketika kebanyakan masyarakat yang menolak rencana tersebut dengan berbagai alasan dan pertimbangan. Maka dengan keadaan tersebut memaksa pemerintah mengadakan sosialisasi secara bertahap dengan tujuan agar masyarakat yang tidak setuju dengan hal tersebut dapat diberi arahan, penjelasan dan penyuluhan tentang pentingnya rencana pemerintah tersebut. Tahap pertama sosialisasi diadakan pada tahun 1965, tahap kedua diadakan pada tahun 1966 dan tahap terakhir diadakan pada tahun berikutnya yaitu pada tahun 1967. Namun pada kenyataannya banyak masyarakat yang menolak terkait rencana pemerintah tersebut. Alasan mereka menolak rencana pemerintah tersebut sangat beraneka ragam. Adapun yang menjadi alasan kuat bagi mereka untuk menolak rencana tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Daerah Yang Ditunjukkan Pemerintah Desa Kontumere Masih Sangat Asing Bagi Mereka

Banyak diantara masyarakat yang beranggapan bahwa untuk pindah ke daerah yang telah ditunjukkan pemerintah desa Kontumere tersebut membuat mereka kesulitan untuk mengembangkan dan mengolah lahan yang masih sangat asing bagi mereka. Di desa Kontumere, daerah yang ditunjukkan oleh pemerintah desa sebagian besar terdiri dari tanaman alang-alang yang sebagaimana mereka ketahui bahwa area hutan yang ditumbuhi pohon alang-alang sangat tidak cocok dengan jenis tanaman yang biasa mereka tanam untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sebagian besar masyarakat kampung Labaluba menggantungkan hidupnya disektor pertanian dimana tanaman yang biasa mereka tanam hanya terbatas pada jagung, kacang tanah, singkong dan sebagian sayuran. Masyarakat Kampung Labaluba sadar betul bahwa semua jenis tanaman tersebut diatas tidak cocok dengan lahan yang ditunjukkan oleh pemerintah desa Kontumere yang sebagian besar terdiri dari hamparan alang-alang. Selain itu, untuk mengolah lahan yang telah ditunjukkan tersebut masyarakat tidak mempunyai alat pertanian yang dapat menunjang proses pengolahan lahan. Masyarakat pada saat itu hanya mengolah lahan ladang mereka berbekalkan parang tradisional dan tembilang saja yang fungsinyapun sangat terbatas. Sebagaimana diketahui bahwa daerah yang ditumbuhi tanaman alang-alang memiliki keadaan tanah yang sangat keras. Adapun lahan yang sebagian kecil tidak ditumbuhi alang-alang merupakan area pepohonan lebat yang tidak dapat diolah dengan peralatan sederhana seperti yang telah disebutkan di atas. Maka oleh karena itu, hal ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat menentang kebijakan dari pemerintah tersebut.

#### 2. Masyarakat Kampung Labaluba Ingin Menjaga Lahan Peninggala Nenek Moyang Mereka

Alasan kedua bagi mereka adalah jika masyarakat Kampung Labaluba pindah di Desa Kontumere, maka mereka tidak dapat lagi kembali ke kampungnya masing-masing yang selama ini mereka anggap sebagai kampung nenek moyang mereka dan telah memberikan kehidupan mereka selama ini. Adanya tempat keramat dan peninggalan-peninggalan lainnya dari nenek moyang mereka seperti kuburan tua membuat mereka untuk enggan meninggalkan tempat tinggal mereka. Perlu diketahui bahwa keadaan masyarakat Kampung Labaluba yang masih terpencar-pencar menjadi beberapa kampung menganggap bahwa kampung yang mereka tinggali pada waktu itu adalah suatu kampung yang menjadi amanah dan tanggung jawab yang diberikan oleh nenek moyang mereka agar mereka menjaganya dengan baik. Bagi mereka situasi kampung yang demikian sudah cukup bagi mereka untuk menunjang kehidupannya, mereka merasa sudah nyaman dengan keadaan alam yang pada waktu itu menyediakan semua kebutuhan dibanding harus pindah ke tempat lain yang belum tentu memberikan suasana kehidupan yang serupa.

#### 3. Adanya Anggapan Dari Masyarakat Bahwa Lahan Yang Mereka Tinggalkan Akan Diambil Alih Oleh Pemerintah

Alasan lainnya adalah bahwa bila mereka jadi pindah di tempat yang telah ditunjukkan maka lahan yang mereka tinggali selama ini akan diambil alih oleh pemerintah. Hal ini mereka anggap wajar sebab pada waktu itu pemerintah seolah ngotot dan memaksakan kehendaknya dengan adanya kebijakan tersebut. Sikap keras yang ditunjukkan oleh pemerintah pada waktu itu terutama pemerintah kecamatan dianggap oleh masyarakat setempat sebagai salah satu bentuk pemaksaan kehendaknya terhadap masyarakat yang dipimpinnya. Pada saat sosialisasi mengenai rencana

pemerintah untuk memindahkan masyarakat Kampung Labaluba, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa yang telah diberikan tugas oleh pemerintah kabupaten dalam menjalankan tugasnya awalnya mengadakan pendekatan secara emosional yang berarti bahwa setiap penduduk diberi penjelasan mengenai maksud dan tujuan atas rencana tersebut baik dengan cara sosialisasi berkelompok maupun dengan cara perorangan kepada masyarakat setempat mengenai rencana tersebut, namun setelah adanya keengganan dari penduduk untuk meninggalkan tempat tinggal mereka barulah pemerintah kecamatan mengadakan dan pemerintah desa setempat bersikap keras kepada mereka yang menentang kebijakan tersebut. Tentu saja suasana seperti ini semakin membuat masyarakat setempat semakin tidak suka dengan sikap pemerintah tersebut. Sebagian dari masyarakat beranggapan bahwa ada maksud tersembunyi dari pemerintah atas rencana pemindahan penduduk tersebut.

#### 4. Tidak Adanya Jaminan Dari Pemerintah Mengenai Kesejahteraan Penduduk

Alasan selanjutnya bagi mereka sehingga mereka menolak rencana pemerintah tersebut adalah belum adanya jaminan yang pasti dari pemerintah jika mereka pindah ke tempat yang telah di tunjukkan pemerintah tersebut, kehidupan mereka akan dijamin sejahtera oleh pemerintah selama proses pemindahan berlangsung maupun sebelum mereka mendapatkan bahan pangan yang dapat menunjang kehidupan mereka. Seperti yang diketahui bahwa keadaan lahan yang ditunjukkan pemerintah khususnya di Desa Kontumere memiliki keadaan lahan yang kurang mendukung untuk jenis tanaman yang biasa ditanam oleh masyarakat kampung Labaluba. Ini tentu saja menjadi salah satu kekhawatiran dari masyarakat jika sewaktu-waktu terjadi kekurangan bahan pangan maka pemerintah tidak mau bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Berbekal pengalaman sebelumnya ketika mereka masih mendiami Kampung Labaluba, pemerintah tidak pernah turun tangan ketika terjadi wabah penyakit dan bahaya kelaparan melanda kampung mereka. Dengan adanya fakta tersebut, semakin menjadikan masyarakat keras kepala dan tidak mau meninggalkan tempat mereka untuk pindah ke tempat yang telah ditunjukkan oleh pemerintah. Bahkan tidak jarang penduduk meninggal karena wabah penyakit maupun adanya bencana kelaparan. Pemandangan seperti ini oleh masyarakat setempat pada saat masih tinggal di Kampung Labaluba adalah sesuatu hal yang tidak tabu lagi karena seringnya terjadi peristiwa serupa. Ini juga terjadi karena tidak adanya instansi kesehatan dari pemerintah seperti rumah sakit maupun puskesmas setempat. Sesuatu hal yang mustahil bagi pemerintah pada saat itu adalah membangun instansi pemerintah di tengah masyarakat pedalaman yang jumlahnya masih sedikit dan masih terpencar-pencar di area lahan hutan yang sangat luas.

Namun faktor sebenarnya yang menjadi kendala sehingga masyarakat Kampung Labaluba menolak rencana pemerintah dalam memindahkan tempat tinggal mereka adalah adanya ketidak pahaman dari masyarakat setempat mengenai program tersebut bahwa dengan adanya program tersebut pembangunan yang merata dapat tercapai di segala bidang. Dengan adanya pengumpulan masyarakat tersebut menjadi satu pemukiman dan berada di tengah ibu kota kecamatan membuat pemerintah setempat dapat menjangkau setiap masyarakatnya bila sewaktu-waktu diterapkan suatu kebijakan. Hal ini dipandang oleh pemerintah sebagai langkah yang tepat mengingat setiap kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah harus ditau oleh seluruh rakyatnya sementara untuk menerapkan kebijakan tersebut, baik pemerintah desa maupun pemerintah kecamatan harus mengadakan sosialisasi terlebih dahulu ke pedalaman-pedalaman dan jarak antara satu kampung dengan kampung yang lainnya sangat berjauhan. Dengan adanya rencana tersebut menimbulkan berbagai pandangan dan pro-kontra di masyarakat setempat. Banyak yang kontra terhadap adanya kebijakan tersebut, namun tidak sedikit pula yang menunjukkan sikap pro terhadap adanya rencana kebijakan tersebut.

### **Proses Gerakan Sosial Masyarakat Kampung Labaluba Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna Tahun 1960-1980**

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa sebelum pemerintah kecamatan mengkoordinasi masyarakat Kampung Labaluba berpindah tempat ke desa-desa yang telah ditunjukkan, terlebih dahulu mereka mengadakan sosialisasi terkait rencana kebijakan tersebut dengan tujuan agar masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan tersebut paham bahwa untuk mencapai suatu kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara kearah yang lebih baik,

perlu adanya suatu kebijakan yang mana kebijakan tersebut dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali. Dan proses sosialisasi yang dilakukan tersebut berlangsung sebanyak tiga tahapan, tahap pertama yaitu dilakukan pada tahun 1965, tahap kedua dilakukan pada tahun 1966 dan pada tahap terakhir dilakukan dilakukan pada tahun 1967. Negosiasi dan sosialisasi yang dilakukan pemerintah tampaknya ditanggapi beragam oleh masyarakat, banyak yang setuju dengan adanya rencana pemerintah tersebut terkait pemindahan penduduk, namun lebih banyak yang menolak dengan berbagai alasan. Pada tahun 1969 adalah waktu yang ditentukan oleh pemerintah kecamatan dan pemerintah desa dalam memindahkan penduduk sebagai tahap awal dalam proses pemindahan tersebut, namun sebelum waktunya tiba yaitu sebelum tahun 1969, masyarakat setempat mulai melakukan komplain sebagai bentuk penolakan mereka atas hal tersebut. Masyarakat Kampung Labaluba melalui kepala kampung mereka yaitu La Mukaari menyampaikan ketidaksetujuannya mereka kepada camat Kabawo yaitu Bapak La Ditu. Sekedar diketahui bahwa La Mukaari yang sekaligus kepala Kampung Labaluba adalah adik kandung La Ditu, yang menjabat sebagai camat Kabawo pada waktu itu yang berarti bahwa antara La Ditu dan La Mukaari adalah saudara kandung. Namun gerakan yang dilakukan rakyat Labaluba pada waktu itu untuk menolak kebijakan pemerintah tidak terkoordinir dengan baik, membuat sikap penolakan masyarakat setempat menempatkan pemerintah kecamatan pada situasi yang lebih diuntungkan. Gerakan rakyat setempat pada waktu itu lebih pada gerakan para kepala keluarga saja dan tidak dikomandoi oleh pemimpin atau tanpa ada yang memimpin mereka dalam satu komando untuk menentang kebijakan pemerintah tersebut. Meskipun demikian, mereka mengetahui bahwa sebagian besar penduduk tidak sepakat atas rencana pemerintah tersebut. Pada tahun 1970, diadakan suatu rapat kecil antara masyarakat Kampung Labaluba dengan aparat pemerintah kecamatan dan pemerintah desa yang dipimpin langsung oleh camat Kabawo, La Ditu. Rapat tersebut diadakan di tengah penduduk kampung tepatnya di gunung Latalemanu. Dalam rapat tersebut, pemerintah desa dan kecamatan sekali lagi menyampaikan rencananya yang telah lama dirancangnya. Namun seperti biasanya, masyarakat sekali lagi menolak rencana dari pada pemerintah tersebut. Penolakan demi penolakan yang dilakukan masyarakat kampung Labaluba membuat pemerintah berinisiatif mengambil tindakan paksa dengan melibatkan aparat negara yaitu tentara untuk memindahkan penduduk. Karena kurangnya koordinasi antar masyarakat dalam menentang rencana pemerintah tersebut, maka dengan sangat terpaksa pada tahun 1970 dibawah koordinasi camat Kabawo dan pengawalan dari para tentara yang bertugas, sebagian rakyat Labaluba meninggalkan kampung halaman mereka menuju ke tempat yang telah di sediakan oleh pemerintah. Oleh pemerintah, hal ini adalah sebuah langkah keberhasilan dalam memindahkan penduduk sebagai tahap awal. Karena dalam perencanaannya pemerintah menargetkan proses pemindahan tersebut dalam beberapa tahapan. Diketahui bahwa jumlah masyarakat yang berpindah ke Desa Kontumere pada waktu itu berjumlah sekitar 136 orang

Pada tahun 1971, terjadi suatu hal yang berada diluar perkiraan pemerintah. Sejumlah orang penduduk kembali ke Kampung Labaluba tanpa sepengetahuan dari pemerintah setempat sehingga membuat pemerintah desa dan pemerintah kecamatan kewalahan. Namun, kepulangan mereka ke Kampung Labaluba bukannya tanpa alasan yang kuat. Mereka kembali lantaran terjadi wabah penyakit yang melanda tempat tinggal mereka di Desa Kontumere yang waktu itu bernama kampung baru. Selain itu, masyarakat juga merasakan adanya gangguan dari makhluk halus yang membuat kehidupan mereka semakin tidak nyaman. Sementara pada saat terjadi wabah tersebut tidak ada tindakan nyata dari pemerintah setempat terkait hal tersebut. Banyak dari masyarakat yang meninggal dunia dengan dua peristiwa tersebut di atas. Masyarakat Labaluba menyalahkan pemerintah atas musibah yang menimpa mereka tersebut, sehingga dengan sikap tidak bersahabat dan tanpa sepengetahuan dari pemerintah kecamatan maupun aparat desa setempat mereka kembali ke tempat semula yaitu Kampung Labaluba. Pada kenyataannya, pemerintah belum berhasil mencapai kata sejahtera atas penduduk kampung baru. Ini ditandai dengan masih minimnya pengetahuan masyarakat setempat sistem pertanian yang ditawarkan oleh pemerintah. Ditambah lagi situasi dan kondisi lahan tanah yang berbeda jauh dengan tempat asal mereka. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa tempat untuk pemukiman yang ditunjukan pemerintah adalah sebagian besar hamparan alang-alang yang sulit diolah oleh masyarakat dengan peralatan yang serba terbatas. Namun, dengan sikap tegas dari pemerintah kecamatan penduduk dipaksa kembali ke

kampung baru dengan jaminan akan diberikan pelayanan kesehatan langsung dari pemerintah. Sikap keras dari pemerintah tersebut tidak menjadikan hati rakyat menjadi lunak, malah makin banyak dari penduduk yang menyalahkan pemerintah pada waktu itu. Karena masyarakat tidak mau diatur oleh pemerintah, maka pemerintah kembali menurunkan tentara untuk memaksa masyarakat supaya meninggalkan kampung halaman mereka dan pindah ke kampung baru yang telah di tunjukkan. Pemerintah mengancam bila mereka tidak mau meninggalkan tempat itu, maka kampung tersebut akan dibakar habis. Sehingga pada tahun 1971, banyak masyarakat yang meninggalkan kampungnya menuju tempat yang telah ditunjukkan sebelumnya. Dan pada tahap ini, jumlah penduduk yang pindah diperkirakan berjumlah kurang lebih 200 orang

Pada pertengahan tahun 1972, terjadi kelaparan yang melanda kampung baru Desa Kontumere Kecamatan Kabawo yang berlangsung selama kurang lebih setengah tahun. Hal ini dikarenakan musim kemarau yang melanda tempat mereka yang menyebabkan area penduduk itu tidak dapat mengolah lahan pertaniannya. Ini terjadi karena lahan yang mereka tinggali sebagian besar adalah bekas hamparan alang-alang yang kondisinya sangat memprihatinkan bila terjadi musim panas. Sedangkan masyarakat setempat mempunyai alat yang terbatas untuk mengolah lahan bekas hamparan alang-alang tersebut. Maka masyarakat meminta pertanggungjawaban kepada pemerintah kecamatan dan desa mengenai hal tersebut. Pada peristiwa tersebut, banyak dari masyarakat yang kembali berencana mengolah lahan tempat asal mereka di kampung lama untuk ditanami jagung dan singkong. Menanggapi hal tersebut, pemerintah langsung turun tangan dengan memberikan bantuan beras langsung kepada masyarakat untuk kebutuhan mereka kedepannya. Namun, pada saat itu sudah banyak penduduk yang telah kembali ke kampung lama untuk mengolah ladang mereka. Meskipun lahan di kampung lama sangat sulit mereka olah, namun lahan di kampung baru tidak lebih baik dari lahan yang ada di kampung lama. Masyarakat lebih terbiasa dengan situasi hutan yang banyak ditumbuhi pepohonan dari pada lahan yang sebagian besar adalah hamparan alang-alang. Tanpa berpikir panjang, pemerintah kecamatan dan desa pada waktu itu langsung memberikan peringatan keras kepada penduduk. Bila mereka tidak segera pindah ke kampung baru atau Desa Kontumere, maka setiap penduduk yang tidak mau tunduk akan dibakar kampungnya dan akan seret paksa untuk dipindahkan. Berbekal pengalaman sebelumnya bahwa tegasnya pemerintah kecamatan, maka dengan berat hati masyarakat meninggalkan kampung lama untuk kesekian kalinya. Dan pada tahun 1975 seluruh penduduk kampung lama telah pindah ke kampung baru atau Desa Kontumere yang saat ini tentunya dengan adanya jaminan kesehatan dan terpenuhinya bahan pangan yang mereka butuhkan dari pemerintah selama mereka belum dapat memetik hasil kebun dan hasil tani yang mereka usahakan

Walaupun demikian, konflik-konflik kecil antara masyarakat dan pemerintah tetap timbul sampai pada akhir tahun 70-an. Konflik tersebut kadang muncul karena adanya keinginan pemerintah dan keinginan rakyat yang tidak sejalan. Sebagai contoh adanya keinginan dari rakyat untuk tetap mengolah lahan yang ada di kampung lama yang tidak disetujui oleh pemerintah. Namun seiring berjalannya waktu, konflik tersebut redup bahkan hilang dengan sendirinya.

### **Akibat Gerakan Sosial Masyarakat Kampung Labaluba Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna Tahun 1960-1980**

Salah satu yang pasti terjadi dan akan terjadi di dalam setiap gerakan sosial adalah adanya sebab dan terjadinya akibat yang ditimbulkan oleh gerakan sosial tersebut. Dalam setiap gerakan terutama gerakan sosial, ada dua kemungkinan atau akibat yang ditimbulkan dari gerakan tersebut yaitu adanya kemungkinan atau akibat positif dan adanya kemungkinan atau akibat negatif. Akibat positif yang timbul dari setiap gerakan biasanya adanya keinginan yang terpenuhi dari orang yang melakukan gerakan dan akibat negatif yang timbul biasanya karena tidak terpenuhinya tuntutan dari orang yang melakukan gerakan.

Adapun akibat yang ditimbulkan dari adanya gerakan sosial rakyat Labaluba Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna menentang pemindahan penduduk terbagi menjadi dua yaitu akibat positif dan akibat negatif.

#### **1. Akibat Positif**

Masyarakat Kampung Labaluba Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna mempunyai fakta sejarah yang carut marut dalam hal menentang kebijakan pemerintah dalam

memindahkan penduduk dari Kampung Labaluba ke Desa Kontumere di era tahun 60-an sampai tahun 80-an. Pada masa itu, masyarakat merasa pemerintah seolah tidak memperdulikan nasib rakyat dan seolah menunjukkan sikap tidak bersahabat dengan rakyat yang menyebabkan mereka menolak kebijakan pemerintah tersebut dalam hal pemindahan penduduk. Namun, gejolak yang timbul antara pemerintah dan rakyat tersebut terdapat hal positif atau akibat positif yang ditimbulkan dengan sikap penduduk yang menolak untuk dipindahkan antara lain:

- a) Timbulnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebersamaan
- b) Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya suatu kebijakan pemerintah
- c) Masyarakat dapat merasakan secara langsung dan cepat setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah baik pemerintah Desa, pemerintah Kecamatan maupun pemerintah Kabupaten
- d) Tercapainya keinginan masyarakat dibidang infrastruktur, sarana dan prasarana publik
- e) Timbulnya keinginan masyarakat untuk melakukan kontak sosial yang dapat mempererat tali silaturahmi sesama penduduk (La Diro, wawancara: 23 Januari 2019).

### **1. Akibat Negatif**

Adapun akibat negatif yang timbul dengan adanya gerakan sosial rakyat Labaluba Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna menentang pemindahan penduduk ke Desa Kontumere adalah sebagai berikut: (1) Timbulnya rasa tidak percaya dari rakyat terhadap pemerintah setempat; (2) Adanya sikap pemerintah yang cenderung sewenang-wenang; (3) Timbulnya rasa sensitif antar sesama masyarakat sebagai akibat perebutan pembagian lahan oleh pemerintah setempat; (4) Timbulnya anggapan masyarakat setempat tentang status lahan yang mereka tinggalkan

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai gerakan sosial rakyat Labaluba desa Kontumere Kecamatan Kabawo kabupaten Muna menentang kebijakan perpindahan penduduk tahun 1960-1980, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: pertama Latar belakang gerakan sosial masyarakat kampung Labaluba Desa Kontumere kecamatan Kabawo kabupaten Muna tahun 1960-1980 yaitu disebabkan karena adanya ketidakpuasan dari masyarakat Kampung Labaluba Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna terhadap kebijakan pemerintah yang mereka anggap terlalu memaksakan kehendaknya. Masyarakat kampung Labaluba menganggap bahwa rencana kebijakan pemerintah untuk memindahkan masyarakat kampung Labaluba ke desa Kontumere adalah sebuah bentuk pemaksaan kebijakan. Kedua Faktor-faktor yang mendorong gerakan sosial rakyat Labaluba kecamatan Kabawo Kabupaten Muna menentang pemindahan penduduk adalah diantaranya daerah yang ditunjukkan pemerintah Desa Kontumere masih sangat asing bagi mereka, masyarakat kampung Labaluba ingin menjaga lahan peninggalan nenek moyang mereka, adanya anggapan dari masyarakat bahwa lahan yang mereka tinggalkan akan diambil alih oleh pemerintah dan tidak adanya jaminan dari pemerintah mengenai kesejahteraan penduduk bila sewaktu-waktu penduduk mengalami bencana kelaparan, kekeringan, wabah penyakit ataupun bencana lainnya yang dapat mengancam kelangsungan hidup masyarakat. Ketiga Proses gerakan sosial masyarakat Kampung Labaluba Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna berlangsung secara bertahap, dan ini berawal ketika kebijakan pemerintah dianggap oleh rakyat setempat seolah-olah terlalu memaksakan kebijakannya kepada mereka. Kendati menuai kontroversi dan penolakan dari rakyat atas kebijakan pemerintah tersebut, namun seiring berjalannya waktu yang telah berlangsung lama dari tahun ke tahun, masyarakat mulai menyadari dan menerima dengan adanya kebijakan tersebut. Hal ini karena masyarakat telah merasakan langsung manfaat dari adanya kebijakan tersebut. Hingga sampai saat ini tingkat perkembangan di desa kontumere telah mencapai tingkat yang maksimal terbukti dengan dibangunnya beberapa sarana dan prasarana publik di daerah tersebut mulai dari Sekolah Menengah kecamatan, kantor kecamatan, mesjid kecamatan dan desa, polsek dan sarana dan prasarana lainnya yang menunjang kehidupan rakyatnya. Keempat Akibat dari adanya gerakan sosial rakyat Labaluba Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna menentang pemindahan penduduk adalah terbagi dua yaitu: (a) Akibat positif yang terdiri dari: Timbulnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebersamaan, Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya suatu kebijakan pemerintah, Masyarakat dapat merasakan secara langsung dan cepat setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah baik pemerintah Desa, pemerintah Kecamatan maupun pemerintah Kabupaten,

Tercapainya keinginan masyarakat dibidang infrastruktur, sarana dan prasarana publik, Timbulnya keinginan masyarakat untuk melakukan kontak sosial yang dapat mempererat tali silaturahmi sesama penduduk, (b) Akibat negatif yang terdiri dari: Timbulnya rasa tidak percaya dari rakyat terhadap pemerintah setempat, Adanya sikap pemerintah yang cenderung sewenang-wenang, Timbulnya rasa sensitif antar sesama masyarakat sebagai akibat perebutan pembagian lahan oleh pemerintah setempat, Timbulnya anggapan masyarakat setempat tentang status lahan yang mereka tinggalkan yang akan diambil alih oleh pemerintah dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan lainnya yang tidak memihak rakyat

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta. Aksara Pratama.  
Arif, Muhamad. 2011. *Pengantar Kajian Sejarah*. Bandung: Yrama Widya.  
Bintarto. 1981. *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indah.  
Kartodirdjo, Sartono. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.  
Leirissa. 1996. *Historiografi: Suatu Tinjauan Khusus*. Jakarta: Gelora Aksara Pratama.  
Putra, Fadillah. 2006. *Gerakan Sosial*. Malang: Aerrors Press.  
Sjamsuddin, Helius. 2007. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.  
Syarbaini, Syahril. 2013. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.  
Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media